



## IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS OLEH DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DP2KBP3A) DI KECAMATAN NGAMPRAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nopi Ramiyati<sup>1)</sup>, Bunga Aprillia<sup>2)</sup>, Siti Munawaroh<sup>3)</sup>

1,2,3) Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,  
Universitas Jenderal Achmad Yani, Indonesia

### Abstrak

Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Ngamprah belum optimal karena masih terdapat desa yang belum mencapai strata mandiri, dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan, memahami, dan menelaah secara lebih mendalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori implementasi program menurut David C Korten yakni program itu sendiri, organisasi (pelaksanaan program), dan pemanfaat (kelompok sasaran program). Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yang terdiri dari DP2KBP3A Kabupaten Bandung Barat, UPT DP2KBP3A Kecamatan Ngamprah, pemerintah desa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Ngamprah sudah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar desa telah mencapai strata mandiri dan berkelanjutan, namun beberapa masih terkendala pelaporan kegiatan yang belum rutin di *website* resmi.

**Kata Kunci:** Implementasi, Program, Kampung Keluarga Berkualitas.

### Abstract

*The implementation of the Quality Family Village Program in Ngamprah District is not optimal because there are still villages that have not reached the independent and sustainable strata. This study aims to describe, understand, and examine in more depth the implementation of the Quality Family Village Program run by the Population Control, Family Planning, Women's Empowerment and Child Protection Service (DP2KBP3A) in Ngamprah District, West Bandung Regency. The theory used in this study is the program implementation theory according to David C. Korten, namely the*

*program itself, the organization (program implementation), and beneficiaries (program target groups). This study was designed using a qualitative method with a descriptive approach. Informants in this study were selected by purposive sampling consisting of DP2KBP3A West Bandung Regency, UPT DP2KBP3A Ngamprah District, village government, and the community. Data collection techniques were carried out through various techniques, such as interviews, observation, and documentation. The results of the study indicate that the implementation of the Quality Family Village Program in Ngamprah District has been running quite well and has had a positive impact on the community, although not yet fully optimal. Most villages have achieved independent and sustainable levels, but some are still hampered by irregular reporting of activities on the official website.*

**Keywords:** Implementation, Program, Quality Family Village.

## **PENDAHULUAN**

Kampung Keluarga Berkualitas merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo pada 14 Januari 2016 di Dusun Jenawi, Desa Mertasinga, Kecamatan Gunungjati, Kabupaten Cirebon. Sejak dicanangkannya, Program Kampung Keluarga Berkualitas ini semakin terus berkembang di seluruh wilayah Indonesia. Dengan semangat dalam membangun, Program Kampung Keluarga Berkualitas kini telah tersebar luas dan berhasil membentuk ribuan Kampung Keluarga Berkualitas di seluruh wilayah Indonesia.

Program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan suatu wilayah administratif setingkat Rukun Warga (RW), desa, atau wilayah lain yang setara, yang telah memenuhi syarat tertentu untuk dijadikan lokasi pelaksanaan program terpadu di bidang kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga. Program ini juga melibatkan berbagai sektor pembangunan lainnya untuk mendukung peningkatan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat. Pembentukan Kampung Keluarga Berkualitas bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup keluarga dan masyarakat di tingkat kampung melalui penerapan program lintas sektor yang saling terintegrasi. Adapun dasar diselenggarakannya Program Kampung Keluarga Berkualitas yaitu Inpres No. 3 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Kabupaten Bandung Barat merupakan Kabupaten yang ikut serta dalam pengimplementasian Program Kampung Keluarga Berkualitas dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kampung Keluarga Berkualitas. Melalui Program Kampung Keluarga

Berkualitas pemerintah daerah berupaya menumbuhkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perencanaan keluarga dan peningkatan sumber daya manusia. Program Kampung Keluarga Berkualitas merupakan upaya strategis yang dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Bandung Barat. Program ini menjadi bagian dari kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan manusia, sesuai dengan landasan hukum yang menjadi dasar pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas. Melalui program ini, pemerintah daerah berupaya menyediakan layanan yang terintegrasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal kependudukan, kesehatan reproduksi, ketahanan keluarga, serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Kecamatan Ngamprah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat yang mempunyai penduduk yang tinggi. Selain itu juga, Kecamatan Ngamprah menjadi Kecamatan terpadat se-Kabupaten Bandung Barat, sehingga memerlukan perhatian serius dari pihak terkait, khususnya dalam pengelolaan program kependudukan dan keluarga berencana. Dengan ini, pemerintah telah menerapkan program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Ngamprah. Keberadaan program Kampung Keluarga Berkualitas menjadi sangat penting bagi Kecamatan Ngamprah. Program ini hadir sebagai salah satu strategi pemerintah dalam mengendalikan laju pertumbuhan penduduk sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan keluarga.

Berdasarkan hasil observasi awal menyatakan bahwa dalam pelaksanaannya, masih terdapat 3 Kampung Keluarga Berkualitas yang stratanya belum mencapai mandiri, yaitu Desa Cimanggu, Desa Ngamprah dan Desa Pakuhaji. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain sumber anggaran masih mengandalkan APBN dan APBD yang dimana masih rendahnya jumlah anggaran, kurang maksimal dan tidak rutinnya pelaporan kegiatan secara online di website kampung Keluarga Berkualitas, kegiatan yang dilaksanakan belum menyeluruh pada semua seksi, serta capaian (*output*) kegiatan yang masih rendah. Sehingga indikator-indikator yang

menjadi syarat untuk mencapai strata mandiri belum dapat terpenuhi secara maksimal.

Kegiatan-kegiatan di Kampung Keluarga Berkualitas belum dapat terlaksana secara menyeluruh dapat disebabkan oleh kurangnya partisipasi masyarakat. Lalu keterbatasan anggaran operasional membuat tidak semua kegiatan di setiap seksi bisa dijalankan sesuai dengan rencana. Meskipun pembagian tugas Pokja sudah ditetapkan dan disesuaikan dengan peran tugas dan tanggung jawabnya masing masing yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) kepala desa, namun pelaksanaan tugas di lapangan masih menghadapi kendala.

Selain itu juga ditemukan masih adanya masyarakat yang kebutuhannya belum terpenuhi melalui program yang dilaksanakan, sehingga biasanya masyarakat mengeluhkan atau menyampaikan aspirasi mereka lewat posyandu. Lalu masih terdapat masyarakat yang belum mengetahui secara menyeluruh mengenai keberadaan dan tujuan dari program Kampung Keluarga Berkualitas ini. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun program ini telah dibentuk di seluruh desa, namun upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat masih perlu ditingkatkan lagi. Kurangnya pemahaman dan pengetahuan ini juga berdampak pada rendahnya partisipasi aktif masyarakat terhadap kegiatan program.

Berdasarkan fenomena dan permasalahan diatas, sehingga tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menggambarkan, memahami, dan menelaah secara lebih mendalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas yang dijalankan oleh Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dirancang menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode kualitatif yang digunakan mengandalkan pengumpulan data untuk kemudian dianalisis secara induktif, yaitu menarik kesimpulan umum berdasarkan informasi-informasi spesifik yang diperoleh selama proses penelitian berlangsung. Penelitian ini menerapkan metode

deskriptif yang bertujuan untuk mengkaji masalah utama dalam penelitian. Data yang diperoleh melalui survei kemudian dianalisis secara kualitatif dalam bentuk deskriptif guna memberikan gambaran menyeluruh dan menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang telah dirumuskan. Penelitian dilakukan di Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas. Informan dalam penelitian ini dipilih secara *purposive sampling* yang terdiri dari DP2KBP3A, UPT DP2KBP3A Kecamatan Ngamprah, pemerintah desa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui berbagai teknik, seperti wawancara, observasi, dan telaah dokumen.

## **PEMBAHASAN**

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat turut mengupayakan pengimplementasian Program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai strategi percepatan pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui program ini, pemerintah berfokus pada penguatan peran keluarga dalam berbagai aspek seperti kesehatan, pendidikan, pembangunan ekonomi, dan ketahanan keluarga. Meskipun beberapa desa telah melaksanakan program Kampung Keluarga Berkualitas, tetapi tidak semua Kampung Keluarga Berkualitas menunjukkan perkembangan yang optimal.

Kecamatan Ngamprah sendiri sudah melaksanakan program Kampung Keluarga Berkualitas sebagai bagian dari upaya mewujudkan keluarga yang sejahtera dan mandiri. Berbagai kegiatan telah dilaksanakan untuk memberdayakan masyarakat dan memperkuat peran keluarga dalam pembangunan. Namun, untuk memastikan program-program ini efektif dan mencapai hasil yang diinginkan, diperlukan ukuran atau indikator keberhasilan yang jelas. Sehingga hal ini mengacu pada teori David C Korten terdapat tiga dimensi yang dapat dijadikan acuan dalam menilai keberhasilan implementasi program, yaitu:

- 1) Program itu sendiri
- 2) Organisasi (Pelaksanaan program)

### 3) Pemanfaat (Kelompok sasaran program)

Dimensi di atas digunakan oleh peneliti sebagai pedoman dalam menjelaskan dan mendeskripsikan bagaimana Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas oleh dp2kbp3a di Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat melalui wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti sebagai berikut:

#### **1. Program itu sendiri**

Berdasarkan hasil observasi, diketahui bahwa strata Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Ngamprah belum seluruhnya mencapai kategori mandiri dan berkelanjutan, karena hal ini disebabkan masih adanya pokja Kampung Keluarga Berkualitas yang belum melaksanakan pelaporan kegiatan secara rutin melalui *website* resmi Kampung Keluarga Berkualitas. Disisi lain tingkat kesertaan KB sudah melampaui rata-rata yang telah ditentukan, yang dimana hal tersebut menjadi salah satu syarat dalam mencapai strata mandiri dan berkelanjutan.

Meskipun sebagian besar Kampung Keluarga Berkualitas telah menunjukkan perkembangan dengan capaian strata mandiri dan berkelanjutan berada di atas 50%, namun masih terdapat tiga Kampung Keluarga Berkualitas yang masih berada pada strata berkembang. Selain itu, rendahnya capaian strata pada sebagian Kampung Keluarga Berkualitas ini juga dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan. Masih ditemukan sebagian warga yang bersikap cuek dan acuh tak acuh terhadap program yang dijalankan. Kurangnya minat dan keterlibatan ini menunjukkan bahwa tidak semua orang memahami tujuan dan manfaat Program Kampung Keluarga Berkualitas.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, keberadaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Ngamprah telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Seperti dari aspek ekonomi, pembentukan Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dapat membantu mendorong kemandirian ekonomi keluarga melalui usaha masyarakat yang produktif. Lalu dari aspek pendidikan keluarga dan ketahanan keluarga, seperti

pelaksanaan Tribina (BKB, BKR, dan BKL) telah berjalan dan berperan dalam peningkatan pengetahuan orang tua dalam pengasuhan anak, pembinaan remaja, dan pemberdayaan lansia. Selanjutnya aspek sosial lingkungan, masyarakat mulai menunjukkan perubahan perilaku menuju pola hidup bersih dan sehat dengan lingkungan yang lebih tertata. Adapun dari aspek keagamaannya, pengajian rutin yang menjadi bagian dari program ini memberikan dampak positif dalam memperkuat nilai-nilai agama serta meningkatkan kesadaran rohani masyarakat. Selanjutnya dari aspek kesehatan, seperti kesehatan reproduksi dan perencanaan keluarga, program ini terus mendorong penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) sebagai upaya menekan angka kelahiran dan mencegah ledakan penduduk. Tingkat kesertaan KB aktif (CPR) di Kecamatan Ngamprah mencapai 72%, yang berarti sebagian besar pasangan usia subur di wilayah tersebut telah menggunakan alat kontrasepsi. Angka ini sudah melampaui standar minimal 50% yang menjadi syarat peningkatan strata Kampung Keluarga Berkualitas ke tingkat berkelanjutan dan mandiri. Selain itu, penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang di Kecamatan Ngamprah sudah mencapai 25%, yang juga sudah lebih dari rata-rata tingkat kabupaten.

Berjalannya berbagai kegiatan dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas tersebut tidak terlepas dari dukungan struktur kelembagaan yang telah memenuhi persyaratan dasar pelaksanaan program. Keberlanjutan program ini didukung oleh legalitas yang jelas, terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) yang ada di setiap desa yang menjadi dasar pelaksanaan program. Karena didalam Surat Keputusan (SK) tersebut, mengatur struktur organisasi, tugas dan fungsi pengurus Kampung Keluarga Berkualitas. Dengan adanya dasar hukum, pelaksanaan program menjadi lebih terarah, terencana, dan memiliki kejelasan mekanisme koordinasi antar pemangku kepentingan.

## **2. Organisasi (Pelaksanaan program)**

Berdasarkan hasil wawancara bahwa keterampilan Pokja Kampung Keluarga Berkualitas sudah cukup baik. Mereka sudah mendapatkan sosialisasi, pembinaan dan pelatihan yang diberikan oleh UPT dan penyuluh

lapangan keluarga berencana. Materi yang diberikan dalam pembinaan tersebut umumnya berkaitan dengan peningkatan kapasitas pelaksana program, seperti cara bagaimana pelaporan kegiatan ke website resmi Kampung Keluarga Berkualitas, pelaporan manualnya, mengelola data keluarga, dsb. Sehingga dengan adanya kegiatan pembinaan atau pelatihan tersebut dapat meningkatkan keterampilan para Pokja Kampung Keluarga Berkualitas. Namun kenyataannya masih terdapat Pokja Kampung Keluarga Berkualitas yang tidak rutin melaporkan kegiatannya ke website resmi Kampung Keluarga Berkualitas.

Selain itu, proses pengambilan keputusan umumnya dilakukan secara musyawarah, seperti musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) dengan melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah desa, kader, dan perwakilan masyarakat. Sehingga ketika ada kebutuhan atau aspirasi yang diusulkan oleh masyarakat tidak semuanya dapat langsung ditindaklanjuti, karena harus melalui proses penilaian dan penentuan skala prioritas program. Setiap usulan yang telah di ajukan masyarakat akan di himpun terlebih dahulu, kemudian dibahas di musyawarah dusun (musdus) dan musyawarah desa (musdes) untuk menentukan urgensi dan skala prioritas program yang akan dilaksanakan, sehingga keputusannya akan diputuskan bersama – sama dengan pemerintah desa dan perwakilan masyarakat.

Sehingga hal ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas, koordinasi dan komunikasi antar pelaksana sudah berjalan cukup baik, dalam proses pengambilan keputusan juga sudah berjalan dan bersifat partisipatif. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan dalam aspek kedisiplinan dan konsistensi pelaporan kegiatan agar program dapat berjalan lebih optimal dan terukur. Kurangnya pelaporan rutin dari sebagian Pokja menunjukkan bahwa masih ada kendala dalam penerapan hasil pelatihan, baik karena keterbatasan sumber daya manusia, waktu, maupun kurangnya pemantauan. Oleh karena itu, perlu adanya sistem monitoring dan evaluasi yang lebih terstruktur untuk memastikan bahwa setiap kegiatan dan keputusan organisasi

terdokumentasi dengan baik dan mendukung pencapaian tujuan Program Kampung Keluarga Berkualitas secara berkelanjutan.

Organisasi atau pelaksana program memiliki peran penting dalam implementasi program Kampung Keluarga Berkualitas, yang bertanggung jawab untuk menggerakkan seluruh kegiatan agar tujuan tercapai. Para pokja telah dibekali keterampilan yang memadai melalui pelatihan maupun pembinaan yang menunjukkan adanya prioritas pada penguatan kapasitas pelaksana. Namun, pada peningkatan kedisiplinan dan konsistensi dalam pelaporan kegiatan perlu ditingkatkan lagi agar program dapat berjalan lebih optimal dan terukur. Pada proses pengambilan keputusan melibatkan berbagai pihak terkait dan memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada hasil diskusi dan kesepakatan bersama. Keputusan diambil melalui rapat koordinasi, musdus dan musdes yang didasarkan pada partisipasi dan musyawarah.

### **3. Pemanfaat (Kelompok sasaran program)**

Hasil observasi menunjukkan bahwa meskipun Program Kampung Keluarga Berkualitas telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun masih terdapat sejumlah kebutuhan masyarakat yang belum sepenuhnya terpenuhi. Sehingga masyarakat umumnya menyampaikan aspirasi dan usulan kebutuhan mereka melalui kegiatan posyandu.

Menurut hasil observasi dan wawancara menunjukkan bahwa mekanisme penyampaian kebutuhan masyarakat dalam Program Kampung Keluarga Berkualitas berjalan secara partisipatif. Biasanya masyarakat menyampaikan aspirasi atau keluhan mereka melalui musdus, musdes, dan kegiatan posyandu. Karena saat ini Posyandu menjadi ruang komunikasi yang penting karena tidak hanya menyediakan pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga menjadi sarana penyampaian informasi, aspirasi, dan kebutuhan masyarakat kepada kader maupun pokja Kampung Keluarga Berkualitas.

Sehingga pemanfaatan program Kampung Keluarga Berkualitas menunjukkan bahwa penerima manfaat atau kelompok sasaran mempunyai peran penting dalam keberhasilan program. Program ini bertujuan untuk memberikan manfaat dan perubahan positif bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebutuhan penerima dari berbagai bentuk

menjadi dasar penting dalam menentukan arah pelaksanaan program. Meskipun masih terdapat kebutuhan yang belum terpenuhi, karena karakteristik dan kebutuhan yang berbeda antar desa yang perlu disesuaikan. Tuntutan atau ungkapan kebutuhan masyarakat, yang disampaikan melalui aspirasi, saran, atau permintaan merupakan bentuk partisipasi untuk menjamin program tetap relevan dan tepat sasaran. Mekanisme penyampaian aspirasi melalui Posyandu, musdus, dan musdes menunjukkan adanya struktur kelembagaan yang jelas dalam pengelolaan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, program ini mendorong keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi kegiatan, sehingga setiap masukan dapat diperhatikan secara transparan.

## **KESIMPULAN**

Pelaksanaan Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Ngamprah berjalan cukup baik dan memberikan dampak positif bagi masyarakat, meskipun belum sepenuhnya optimal. Sebagian besar desa telah mencapai strata mandiri dan berkelanjutan, namun masih ada beberapa yang tertinggal karena kurangnya pelaporan kegiatan secara rutin melalui *website* resmi. Program ini berdampak positif pada aspek ekonomi, sosial, kesehatan, lingkungan, dan keagamaan. Secara kelembagaan, program ini telah memiliki dasar hukum dan struktur organisasi yang jelas, namun masih terdapat kendala dalam pelaksanaan tugas Pokja dan kedisiplinan pelaporan, yang menghambat peningkatan capaian strata Kampung Keluarga Berkualitas.

Organisasi pelaksana Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kecamatan Ngamprah telah memiliki struktur yang jelas dan sumber daya manusia yang cukup kompeten. Pembinaan dan pelatihan rutin menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas, meski kemampuan pokja masih perlu diperkuat terutama dalam pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan. Mekanisme pengambilan keputusan berjalan baik dan partisipatif melalui berbagai forum musyawarah seperti rapat koordinasi di tingkat kecamatan hingga desa.

Keberhasilan Program Kampung Keluarga Berkualitas sangat dipengaruhi oleh peran aktif masyarakat sebagai penerima manfaat. Program ini telah memberikan dampak positif di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial, meskipun belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan di setiap desa karena perbedaan karakteristik dan tantangan lokal. Pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dengan prioritas pada kebutuhan mendesak, sementara penyampaian aspirasi masyarakat berlangsung partisipatif melalui berbagai forum seperti posyandu, musdus, dan musdes.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif. Makassar.

BKKBN. (2022). Modul 3 Kampung Keluarga Berkeaitas. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kependudukan dan KB Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional.

BKKBN, B. K. (2017). Pedoman Pengelolaan Kampung KB.

Subarsono. (2005). Analisis Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono, P. D. (2016). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung.

### **UNDANG - UNDANG & PERATURAN**

Inpres No. 3 Tahun 2022, tentang Optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Kampung Keluarga Berkualitas.

### **JURNAL**

Hasriani, R. Y. (2021). Implementasi Program Kampung Keluarga Berkualitas di Kabupaten Pangkajene Dan Kepulauan. Jurnal.uns.ac.id.

Suyanto, M. W. (2019). Implementasi program kampung keluarga berencana dalam membentuk. Kajian Moral dan Kewarganegaraan.